

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki lembaga yang berwenang dalam perumusan dan pengimplementasian keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan segenap penyelenggara negara serta seluruh penduduk yang berada dalam wilayah kekuasaan. Lembaga yang dianggap berwenang dan berkemampuan memaksa tersebut adalah pemerintah. Lembaga pemerintah merupakan suatu entitas yang menyelenggarakan seluruh fungsi negara meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara serta sebagai sistem yang mengintegrasikan pengambilan keputusan dan pelaksana kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Junaidi & Fachri Adnan, 2023). Berdasarkan UUD RI Tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi ke dalam tiga lembaga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan prinsip *checks and balances*. Namun, dalam praktiknya, pembagian kekuasaan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang ideal. Yani (2018) mengungkapkan bahwa meskipun secara teoritis sistem pemerintahan Indonesia mengarah pada model presidensial, dalam praktiknya banyak aspek yang lebih merefleksikan sistem pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan lemahnya efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat serta meminimalkan permasalahan diatas, pemerintah indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbasas pada desentralisasi. Regulasi ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah lokal untuk mewujudkan tata kelola yang lebih inklusif serta responsif. Konsep

desentralitas ini memecah sebagian kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk mendekatkan dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan mempercepat pembangunan daerah.

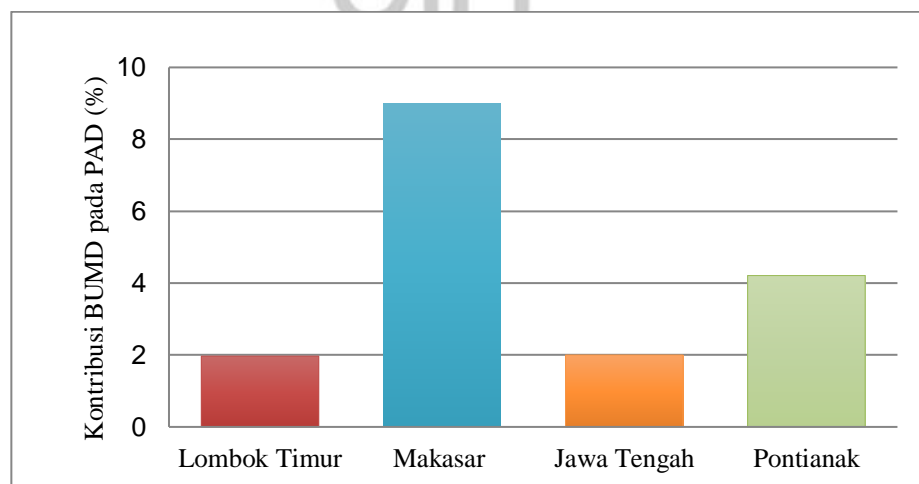
Pemerintah daerah sebagai *stakeholder* di tingkat lokal tentunya memiliki peran integral dalam mengelola administrasi pemerintahan. Peran ini tidak hanya terbatas pada pelayanan publik, tetapi juga terlibat dalam pengimplementasian kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Astuti & Madjid, 2024). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang dimilikinya. Pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dimana keefektifan pengelolaan keuangan sangat bergantung pada peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu badan yang turut memberikan kontribusi pada sumber pendapatan utama daerah. BUMD berfungsi sebagai lembaga yang berperan secara strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya daerah secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya BUMD, daerah diharapkan dapat mengoptimalkan aset serta sumber daya yang ada di daerah, seperti sumber daya alam dan infrastruktur, untuk menghasilkan keuntungan yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Meskipun BUMD diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengelola potensi ekonomi lokal, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMD menghadapi berbagai permasalahan struktural dan manajerial (Halim, 2020). Beberapa di antaranya adalah

kinerja keuangan yang belum optimal, tingginya rasio beban operasional terhadap pendapatan, lemahnya tata kelola perusahaan, minimnya profesionalisme manajerial, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Bahkan, tidak sedikit BUMD yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah dan justru menjadi beban APBD karena ketergantungan pada subsidi dan bantuan modal daerah (Mardiasmo, 2018b).

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri RI (2024) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lebih dari 30% BUMD di Indonesia tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, dan sebagian di antaranya mengalami kerugian secara terus-menerus. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD adalah buruknya kinerja keuangan perusahaan. Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan bahwa rata-rata tingkat keuntungan (*return*) BUMD hanya sekitar 3% dari nilai total aset yang dikelola, sementara di beberapa daerah, kontribusi BUMD terhadap PAD bahkan tidak mencapai 2% (BPK RI, 2023).

Untuk lebih jelas, berikut disajikan grafik yang membandingkan kontribusi BUMD terhadap PAD di empat daerah berbeda di Indonesia :



Gambar 1. 1 Kontribusi BUMD Terhadap PAD di Indonesia

Sumber : (Rakha, 2021), (Fadhila, 2022), (Dianniar, 2023), (DPRD Provinsi Jawa Timur, 2024)

Pada Gambar 1.1 diatas terlihat bahwa di Lombok Timur dan Jawa Timur, kontribusi BUMD terhadap PAD hanya sekitar 2%, sementara di Makassar secara kolektif BUMD menyumbang kurang dari 10% PAD. Di Pontianak, realisasi *dividen* dari BUMD hanya mencapai 4% dari target yang ditetapkan (Dianniar, 2023). Angka-angka ini menunjukkan permasalahan sistemik dalam pengelolaan BUMD, baik dari aspek manajerial, efisiensi keuangan, maupun tata kelola perusahaan.

Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah yang strategis di pulau jawa, memiliki sejumlah BUMD yang tersebar diberbagai sektor, mulai dari jasa keuangan, pertanian dan pangan, hingga penjaminan kredit. Namun demikian, secara umum kontribusi BUMD tersebut terhadap PAD Provinsi Banten juga masih dinilai belum optimal, baik dari sisi profitabilitas, efisiensi, operasional, maupun peran sosial ekonominya. Banyak BUMD yang belum memiliki sistem manajemen risiko yang baik, belum menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara menyeluruh, serta belum mampu membangun kultur kinerja yang berbasis pada profesionalisme (DPRD Provinsi Banten, 2023). Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022 mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam sistem pengendalian internal BUMD di Banten, termasuk di antaranya adalah ketidaksesuaian prosedur pengadaan barang dan jasa, lemahnya pelaporan keuangan, serta tidak maksimalnya fungsi pengawasan internal dan eksternal (BPK RI Provinsi Banten, 2023). Dari sini kemudian timbul ketidakefektifan antara tujuan pendirian BUMD dengan realisasi kinerja dilapangan seperti minimnya penyetoran *dividen* secara rutin dan signifikan terhadap pemerintah daerah dikarenakan rendahnya tingkat profitabilitas BUMD dalam satu periode. Padahal jika tingkat profitabilitas BUMD tinggi, *dividen* dapat disalurkan dan menjadi sumber PAD yang penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan

pelayanan publik. Lebih lanjut berikut disajikan daftar BUMD Banten beserta kontribusinya terhadap PAD :

Tabel 1. 1 BUMD Provinsi Banten dan Kontribusinya Terhadap PAD

No	BUMD	Sektor Usaha	Kontribusi terhadap PAD	Status Penyetoran
1.	PT. Jamkrida Banten	Penjaminan kredit	Rp > 7 miliar	Rutin (2020-2023)
2.	PT Agrobisnis Banten Mandiri	Pertanian dan Pangan	Rp 1,5 miliar	Satu kali (2022)
3.	PT Banten Global Development (BGD)	Investasi dan Holding BUMD	Rp 2 miliar	Satu kali (2014)
4.	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Jasa Keuangan (Perbankan)	-	Belum pernah menyumbang PAD

Sumber : (Amna, 2014) ; (Fadilah, 2023) ; (Hendriana, 2022); (IDXChannel, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa meskipun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai suatu entitas yang diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada kenyataannya masih sangat terbatas. Berdasarkan data, dari beberapa BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten, hanya PT Jamkrida Banten yang secara konsisten memberikan setoran laba kepada daerah, dengan nilai kontribusi lebih dari Rp 7 miliar selama kurun tahun 2020-2023. Sementara itu, dua BUMD lain seperti PT. Agrobisnis Banten Mandiri hanya pernah sekali berkontribusi pada PAD pada tahun 2022 dengan nilai *dividen* sebesar Rp 1,5 miliar, begitu pula PT Banten *Global*

Development (BGD) yang memberikan *dividen* satu kali sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2014 itu berarti hampir satu dekade perusahaan tersebut tidak dapat menyetorkan *dividen*. Sementara itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk, yang merupakan BUMD strategis di sektor keuangan, hingga saat ini belum memberikan kontribusi langsung ke PAD dalam bentuk *dividen*, meskipun sudah dua tahun berturut-turut mencetak laba bersih dikarenakan Bank Banten masih mengalami defisit hingga akhir tahun 2024 sehingga laba yang telah dicetak ditetapkan sebagai laba ditahan untuk memperkuat keuangan.

Kondisi ini mendukung pernyataan bahwa mayoritas BUMD di Indonesia masih belum optimal dalam peranannya meningkatkan PAD. Dari empat entitas yang ditelusuri, tiga diantaranya menyisakan potensi besar yang belum dimanfaatkan dan hanya satu yang memberi hasil nyata. Hal ini mendukung argumen bahwa efektivitas dan akuntabilitas kinerja keuangan BUMD perlu dikaji secara serius, khususnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk.

Sejak berdiri hingga akhir tahun 2023, Bank Banten mengalami permasalahan struktural dalam kinerja keuangan. Bank ini mencatat akumulasi kerugian sebesar ± Rp 2,9 triliun. Menurut Emitennews.com Bank Banten sampai saat ini masih harus berkuat dengan warisan kerugian tersebut sehingga saham yang dimiliki bank tidak diminati investor dan hanya bertahan di level gocap dalam kurun waktu yang sangat lama (Administrator, 2023). Hal ini tentunya menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan BUMD tersebut. Menurut Laporan keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Tahun 2021, kerugian bersih tercatat sebesar Rp 265,1 miliar, sementara pada tahun 2022 kerugian menurun menjadi Rp 239.2 miliar hingga pada tahun 2023, laba berhasil didapatkan Bank Banten sebesar Rp 26,59 miliar dan terus meningkat 44% menjadi Rp 39,33 miliar pada tahun 2024. Agar lebih lanjut, berikut disajikan tabel akumulasi laba rugi yang terdapat

dalam laporan keuangan tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk Tahun 2021-2024 :

Tabel 1. 2 Laba (Rugi) PT. BPD Banten Tbk. Tahun 2021-2024

Akun	Periode tahun (dalam rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Laba (Rugi) Bersih	(265.176.)	(239.287)	26.590	39.330

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten 2021-2024 (diolah)

Di sisi lain, kondisi aset dan permodalan Bank Banten juga mengalami tekanan. Aset bank menurun dari Rp 8.849.611 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 7.233.058 juta pada tahun 2022 dan semakin anjlok dengan nilai Rp 6,800.821 juta pada tahun 2023 sebelum kembali naik pada tahun 2024 sebesar Rp 7.551.115 juta. Berikut disajikan posisi laporan keuangan BPD Banten dari sisi aset tahun 2021-2024 :

Tabel 1. 3 Aset PT. BPD Banten Tbk. Tahun 2021-2024

Akun	Periode tahun (dalam Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Aset	8.849.611	7.233.058	6.800.821	7.551.115

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Banten 2021-2024 (diolah)

Selain itu, Bank Banten juga menghadapi tekanan dari sisi tata kelola. Adanya kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 61 miliar serta desakan masyarakat terhadap pembubaran bank akibat kerugian yang terus-menerus memperkuat urgensi perlunya restrukturisasi kelembagaan dan strategi usaha yang lebih efisien (Ridho, 2023).

Melihat pada masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk seperti dijelaskan diatas. Maka sudah

seharusnya seluruh *stakeholder* mampu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga BUMD bisa terus berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Efisiensi biaya operasional dan peningkatan kualitas aset menjadi strategi utama dalam memperbaiki kinerja. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam terhadap kinerja keuangan Bank Banten sebagai penggerak fiskal daerah. Salah satunya dengan cara menganalisis laporan keuangan dengan *Common Size* dan rasio BOPO (Hery, 2018). Analisis *Common Size* digunakan untuk mengevaluasi struktur dan proporsi komponen laporan keuangan dengan membandingkan akun-akun yang telah diubah kedalam bentuk persen terhadap total akun dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan perbandingan antar pos-pos dalam laporan keuangan melalui cara yang tidak terpaku pada rumus, melainkan pada perbandingan presentase data (Kasmir, 2019). Analisis *Common Size* ini juga memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi perubahan struktur keuangan dan *tren* yang sedang terjadi. Sementara rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional menurut Kasmir dalam Buku Manajemen Perbankan (2017) adalah rasio yang sering digunakan untuk menilai efisiensi operasional perusahaan dengan cara mengakumulasikan seluruh beban operasional dalam satu tahun tertentu terhadap pendapatan operasional. Dimana semakin rendah rasio BOPO yang ditunjukkan, maka berarti semakin efisien pula operasional perusahaan tersebut.

Dari data dan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Metode *Common Size* dan Rasio BOPO Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Periode Tahun 2021-2024” untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan bank dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dengan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif menggunakan analisis *Common Size* sebagai perbandingan dan analisis Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) untuk mengukur tingkat

efisiensi beban operasional perusahaan sehingga hasil analisis dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang strategis bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya di masa yang akan datang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, khususnya di Provinsi Banten, di mana sebagian besar BUMD belum memberikan *dividen* secara rutin dan signifikan kepada pemerintah daerah.
- 2) Kinerja keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk masih belum optimal, terlihat dari akumulasi kerugian besar sejak pendiriannya, meskipun mulai mencetak laba pada tahun 2023 dan 2024.
- 3) Masih terdapat kelemahan dalam tata kelola, pengawasan internal, dan pelaporan keuangan di lingkungan Bank Banten, yang berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Berdasarkan Analisis *Common Size* Selama Periode Tahun 2021-2024?
- 2) Bagaimana Tingkat Efisiensi Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. yang diukur menggunakan Analisis Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Periode Tahun 2021-2024?

D. Tujuan Penelitian

Selanjutnya, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah yang sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Memberikan Gambaran serta Pemahaman Mengenai Hasil Analisis Kinerja Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten) Periode Tahun 2021-2024 jika dianalisis menggunakan *Common Size* .
- 2) Untuk Memberikan Gambaran serta Pemahaman Mengenai Kinerja Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten) Periode Tahun 2021-2024 menggunakan analisis Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

E. Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dengan uraian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber bagi peneliti dalam mengembangkan dan memperluas wawasan penulis mengenai Ilmu Administrasi Publik.
 - b. Hasil dari penelitian ini mampu menjadi salah satu sumber bagi peneliti dalam mengembangkan dan memperluas wawasan mengenai Keuangan Publik.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber bagi peneliti dalam mengembangkan dan memperluas wawasan mengenai Kinerja Keuangan suatu perusahaan menggunakan Analisis *Common Size* dan Analisis Rasio BOPO.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian mampu menjadi salah satu sumber untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian dengan tema yang serupa di masa mendatang.
 - b. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sarana informasi

tentang bagaimana Analisis *Common Size* dan Analisis Rasio BOPO dapat menilai kinerja keuangan suatu perusahaan.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir didefinisikan sebagai suatu model konseptual mengenai hubungan antara teori dengan faktor lain yang telah ditentukan sebagai suatu permasalahan. Kerangka pikir juga dijelaskan sebagai keterkaitan variabel dengan teori yang akan diteliti, itu berarti kerangka berpikir perlu dijelaskan secara bagaimana dan seperti apa hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Konsep kerangka pikir yang digunakan peneliti diawali dengan kajian teori umum Administrasi Publik sebagai *Grand Theory* kemudian Keuangan publik sebagai *Middle Range Theory* dan terakhir Kinerja Keuangan sebagai *Operational Theory*. Administrasi publik sebagai *Grand Theory* memandang pemerintah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik dalam prakteknya tidak hanya berbicara tentang organisasi kelembagaan dan pelaksana birokrasi, tetapi juga menyangkut bagaimana negara, melalui lembaga-lembaganya, mampu mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan sehingga manajemen sumber daya diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan tugas (Rodiyah, Hendra Sukmana, Lailul Mursyidah, Mojopahit, & Sidoarjo, 2021). Dalam konteks ini, berarti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan bagian dari administrasi publik juga menjadi sangat penting karena berperan ganda, yakni sebagai instrumen pelayanan publik sekaligus sebagai entitas ekonomi dan bisnis yang memanfaatkan sumber daya lokal tersedia sehingga mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menjembatani antara konsep administrasi publik dan implementasinya dalam konteks pengelolaan entitas ekonomi dan bisnis milik pemerintah daerah seperti BUMD, maka digunakan Teori Keuangan Publik sebagai *Middle-Range Theory*. Teori ini memberikan kerangka

konseptual yang lebih spesifik dalam menjelaskan bagaimana keuangan sektor publik harus direncanakan, dikelola, dialokasikan, dan dievaluasi. Menurut Bastian (2020) fungsi keuangan publik meliputi bagaimana pemerintah memobilisasi pendapatan, mengalokasikan dana publik, melakukan belanja publik serta pertanggungjawaban dana tersebut terhadap publik. Dalam konteks BUMD, teori keuangan publik mengarahkan pada perlunya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan serta efisien, karena dana yang dikelola berasal dari dan ditujukan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, entitas seperti BUMD tidak hanya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara administratif, tetapi juga secara finansial dan sosial kepada masyarakat serta pemerintah daerah sebagai pemilik modal.

Lebih lanjut, untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada BUMD seperti PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. yang memiliki mandat strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan optimalisasi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), peneliti kemudian menggunakan pendekatan Kinerja Keuangan sebagai *Operational Theory*. Kinerja keuangan menjadi representasi konkret dari keberhasilan manajemen dalam mengelola aset, kewajiban, dan pendapatan untuk mendukung tujuan organisasi (Kasmir, 2019). Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan metode *Common Size*, yang berfungsi untuk menganalisis struktur laporan keuangan secara proporsional dan memberikan gambaran yang lebih komparatif antar periode meliputi struktur biaya dan pendapatan, tingkat efisiensi operasional, serta tren pertumbuhan aset yang merupakan indikator utama efektivitas tata kelola keuangan publik di tingkat daerah (Rolizda & Sukiyarningsih, 2023). Selain itu, digunakan juga rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) sebagai indikator efisiensi operasional bank, yang menggambarkan seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama

perusahaan. Penggunaan dua metode ini bertujuan untuk memberikan penilaian objektif atas kondisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. selama periode 2021–2024 dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan strategis, seperti membenahan regulasi, pembinaan, penambahan modal, dan restrukturisasi BUMD, guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD dan pelayanan publik secara menyeluruh (Kasmir, 2019).

Adapun kerangka berpikir jika disajikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

